



DIY Bebas Vaksin Palsu

JOGJA-DIY dinyatakan bebas vaksin palsu. Menurut Pemerintah Daerah DIY, indikasi penyebaran vaksin palsu belum terbukti.

*Jumali & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com*

Keyakinan itu didasarkan pada penelusuran dan pengecekan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY di 109 sarana kesehatan pemerintah dan swasta di wilayahnya.

Penelusuran itu mencakup pengecekan dokumen dan produksi vaksin, izin edar dan sumber pengadaan vaksin.

"Pengadaan [vaksin] secara resmi tidak ada masalah. Sementara, untuk pengadaan tidak resmi, BPOM telah melakukan *sampling* dan pengujian," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan DIY, Sulistyo, di Kepatihan, Jogja, Kamis (30/6).

Meskipun demikian, ia meminta kepada warga yang resah dengan keberadaan vaksin palsu untuk mengecek.

● Lebih Lenokao Halaman 8

MENELUSURI VAKSIN PALSU

Tak ada vaksin palsu yang beredar di DIY. Masyarakat bisa bernapas lega, namun disarankan melakukan vaksin ulang jika masih ragu-ragu.

19 Sebanyak 19 sarana kesehatan swasta dan distributor vaksin yang meliputi enam rumah sakit, tiga rumah sakit ibu dan anak, lima apotek, serta tiga perusahaan besar, diperiksa oleh BPOM DIY. Hasilnya, tak ada vaksin palsu ditemukan di DIY.

28 Dari penyelidikan sementara terdapat 28 lebih rumah sakit dan klinik yang menggunakan vaksin palsu. Rumah sakit dan klinik tersebut tersebar di beberapa provinsi. Tidak ada rumah sakit besar yang menggunakan vaksin palsu.

17 Sebanyak 17 tersangka telah dibekuk dalam kasus peredaran vaksin palsu.

Vaksin Ulang, Bahaya atau Tidak?

Vaksin ulang tidak akan berdampak buruk pada kesehatan. Daya tahan tubuh tetap terjaga meski mendapatkan vaksinasi ulang.

Grafis: Mengki Irawan

DIY Bebas...

Pengecekan keaslian vaksin bisa dilakukan secara mudah yakni dengan mencocokkan nomor registrasi yang ada di laman resmi BPOM, www.pom.go.id.

"Selain itu, warga juga bisa melakukan vaksin ulang di puskesmas terdekat," kata Sulisty.

Ketua Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Mei Neni Citaresti menyatakan vaksin ulang tidak akan berdampak buruk pada kesehatan. Ia memastikan daya tahan tubuh tetap terjaga meski mendapatkan vaksinasi ulang.

"Namun, kami sarankan vaksinasi ulang dilakukan di tempat resmi. Ini bukan vaksin ulang akan tetapi vaksin booster, jadi tidak berbahaya, justru lebih baik," imbuh Mei.

Mei mengharapkan warga DIY tidak resah dengan kabar beredar vaksin palsu. Sejauh ini, vaksin yang digunakan oleh pemerintah berasal dari distributor resmi. "Kami minta agar vaksinasi tetap dilanjutkan," katanya.

Kepala BPOM DIY I Gusti Ayu Adi Arya Putri menyatakan, penelusuran terhadap vaksin palsu dilakukan di sarana kesehatan milik swasta.

Menurutnya, sarana kesehatan milik swasta lebih rentan digunakan untuk penyebaran vaksin palsu. Dari 19 sarana dan distributor kesehatan swasta yang meliputi enam rumah sakit, tiga apotek, serta tiga perusahaan besar, tidak ditemukan adanya vaksin palsu. "Sejauh ini tidak ada masalah," kata dia.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti meminta masyarakat tidak resah dengan vaksin. Haryadi yang pernah bekerja di distributor obat terbesar nasional meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan secara rinci soal vaksin yang dipalsukan.

Kepala Dinkes Kota Jogja, Fita Yulia Kisworo, menyatakan tidak ada vaksin palsu yang beredar di Jogja.

Menurut dia, semua vaksin program yang ada di Dinkes Kota Jogja asli berasal dari Kementerian Kesehatan. Vaksin tersebut didistribusikan ke puskesmas. Demikian juga fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengambil vaksin melalui puskesmas.

Dinkes Kota Jogja akan memberikan buku pedoman penyelenggaraan imunisasi yang mencakup standar dan

prosedur pengambilan vaksin dan pelarut imunisasi hingga tingkat puskesmas.

Penelusuran terhadap kemungkinan peredaran vaksin palsu di DIY dilakukan berdasarkan pernyataan Kapolri Pol. Badrodin Haiti. Sebelumnya, Kapolri menyatakan vaksin palsu telah menyebar ke sejumlah provinsi, termasuk DIY. Adapun Bareskrim Polri menyatakan peredaran vaksin palsu sudah merambah enam provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Sumatra Utara.

Kamis kemarin, Badrodin menyatakan nama klinik dan rumah sakit (RS) yang menggunakan vaksin palsu tidak bisa diungkapkan kepada publik karena penyelidikan kasus itu belum tuntas.

"Nanti secara tertutup akan disampaikan Kabareskrim. Ini [data RS yang menggunakan vaksin palsu] belum bisa disampaikan ke publik," jelas Badrodin usai apel pengamanan Lebaran di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Kapolri yang akan masuk masa pensiun pada Juli ini menyatakan penidik tengah mempelajari dampak vaksin palsu setelah disuntikkan kepada anak balita. Dia menyatakan

penyidikan difokuskan untuk mengungkap bahan vaksin palsu, dampak kesehatan vaksin palsu, distribusi, hingga pencegahan peredaran vaksin palsu itu.

Pelaksana Tugas (PT) Kepala BPOM Teuku Bahdar Johan Hamid dalam jumpa pers di Kantor BPOM menyatakan tidak bisa membuka nama RS dan klinik yang menggunakan vaksin palsu.

BPOM bingung karena Bareskrim Polri melarang data RS dan klinik dibuka ke publik, namun sejumlah kalangan termasuk DPR meminta data itu dibuka agar publik bisa lebih waspada.

"Jadi Bareskrim dapat produk. Kemudian menyerahkan ke BPOM untuk diuji. Isi sampel itu yang rahasia. Sekarang kami kirim ke Kemenkes. Apakah boleh diumumkan atau tidak. Yang paling susah ini, DPR minta hasilnya. Bareskrim [mengatakan] jangan dikasih. Ini kami yang bingung," kata dia.

Dari penyelidikan sementara terdapat 28 lebih RS dan klinik yang menggunakan vaksin palsu. RS dan klinik tersebut tersebar di beberapa provinsi. Bahdar memastikan tidak ada RS besar yang menggunakan vaksin palsu. Vaksin palsu digunakan di RS kecil atau klinik.

Salah satu yang diungkap

Bareskrim adalah klinik bidan Monaga Elly Novita di Jl. Centex Raya, Cincas, Jakarta Timur. Elly yang berperan sebagai distributor vaksin palsu ditangkap polisi, Rabu (29/6) malam sehingga ada 17 tersangka dalam kasus ini. Selain mempunyai klinik bidan, Elly diketahui juga menjadi tenaga medis di sebuah RS. "Hari ini [kemarin] kami lakukan prekonstruksi di klinik itu," jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Agung Setya.

Prekonstruksi itu dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Kabareskrim Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto. Nila memastikan puskesmas bebas dari peredaran vaksin palsu.

"Tolong ingat, program pemerintah melalui Biofarma masuk ke distributor yang tercatat resmi, terus masuk ke Dinas Kesehatan dan diberikan sampai ke posyandu. Jadi yang mendapatkan vaksin di puskesmas ini adalah vaksin yang benar," kata Nila.

Nila meminta Bareskrim mengerucutkan daerah yang terdapat vaksin palsu. Data itu diperlukan untuk memberikan vaksin ulang kepada anak balita yang telanjur mendapat vaksin palsu. (Detik/Artana)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005